

Lampiran I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-1/PJ/2011
 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN
 PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI
 PEMOTONGAN DAN/ATAU
 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
 OLEH PIHAK LAIN

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Surat Keterangan
 Bebas Pemotongan dan/atau
 Pemungutan Pajak Penghasilan

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain, dengan ini :

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh*), dengan alasan

Untuk kelengkapan permohonan SKB Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, bersama ini terlampir penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak berjalan (**).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20....
 Pemohon,

*) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPH Pasal 21,22,22 impor, 23)
 **) tidak berlaku untuk WP yang atas penghasilannya hanya dikenakan PPh yang bersifat final

Lampiran II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-1/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI
PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
OLEH PIHAK LAIN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUT PPh PASAL 21/22/23 *)	
NOMOR	:
TANGGAL	:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
menerangkan bahwa orang pribadi / badan *) tersebut di bawah ini:
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/22/23 *) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-/PJ/2011.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal **)

..... 20....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi dengan tanggal akhir tahun pajak bersangkutan

Lampiran III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-1/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI
PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
OLEH PIHAK LAIN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

Lembar Ke-1 : Untuk DJBC
Lembar Ke-2 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR
NOMOR :
TANGGAL :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
menerangkan bahwa orang pribadi / badan *) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

Dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2011.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal**))

..... 20....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi dengan tanggal akhir tahun pajak bersangkutan

Lampiran IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-1/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI
PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
OLEH PIHAK LAIN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

Nomor :
Hal : Penolakan Permohonan Surat
Keterangan Bebas Pemotongan
dan/atau Pemungutan Pajak
Penghasilan

Kepada Yth.

.....
..... *)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal**) yang Saudara ajukan tanggal
nomor dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat
disetujui, karena :

.....
.....
.....
.....

Demikian untuk dimaklumi

..... 20....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

.....
NIP

*) Diisi identitas Wajib Pajak

**) Diisi dengan PPh Pasal 21, 22, 22 impor, dan/atau 23 yang dimintakan SKB